



LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA MAUMERE



TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Pengadilan Agama Maumere

Mahkamah Agung adalah Pengadilan tertinggi di Negara Indonesia sebagaimana dimaksudkan oleh Undang - Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang – Undang nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung secara Organisasi, Administrasi dan Financial dan membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan yakni:

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Tata Usaha Negara
4. Peradilan Militer

Sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan, melalui upaya-upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen organisasinya secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur peradilan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Pengadilan Agama Maumere berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Maumere berkedudukan di Kabupaten Sikka, yakni Kota Maumere dengan alamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka

Guna mewujudkan harapan dari para pencari keadilan tersebut, Pengadilan Agama Maumere dalam rangka melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus membuat suatu perencanaan yang mantap, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat diikuti dengan evaluasi yang cermat. Secara formal pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Maumere tersebut harus dipertanggung jawabkan dalam bentuk laporan ke Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur. Pengadilan Agama Maumere juga telah memiliki *website* yakni www.pa-maumere.go.id yang dapat diakses oleh

masyarakat guna memperoleh informasi mengenai prosedur berperkara, biaya perkara dan lain – lain.

B. Visi Dan Misi

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas, Pengadilan Agama Maumere telah menyusun program kerja sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Agama Maumere dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Visi Pengadilan Agama Maumere mengacu pada visi Mahkamah Agung RI yaitu **“TERWUJUDNYA PERADILAN AGAMA YANG AGUNG”**. Sedangkan untuk misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan;
3. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif;
4. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan;

C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi , Pengadilan Agama Maumere mengambil langkah-langkah kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Strategi (RENSTRA). Dengan rencana strategis ini maka implementasi target, output dan outcome yang diinginkan tercapai. Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere telah dibuat sejak tahun 2015, terakhir disusun Rencana Strategis 2015 – 2019 yang sudah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan kerja untuk tahun 2017.

Adapun Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere tahun 2015-2019 tersebut sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan tertib Administrasi perkara.

3. Peningkatan Penyelesaian perkara melalui mediasi.
4. Terwujudnya SDM yang professional dan memiliki integritas yang tinggi.
5. Peningkatan pelaksanaan pelaporan informasi dan pengawasan.

BAB II

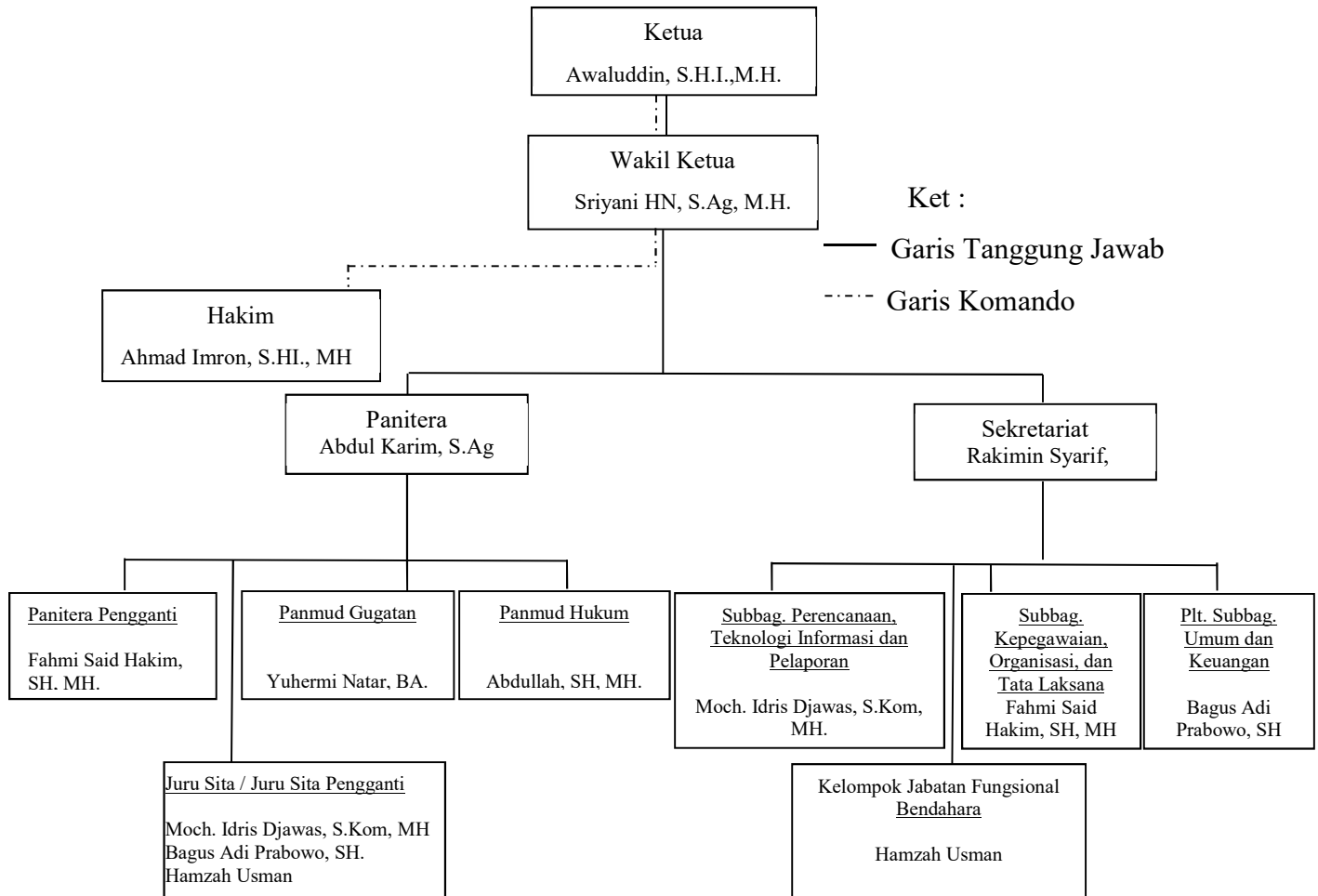
STRUKTUR ORGANISASI DAN PELAYANAN PUBLIK

A. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maumere sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sampai dengan akhir Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Awaluddin, S.H.I.,M.H.
2. Wakil Ketua : Sriyani HN, S.Ag.,M.H.
3. Hakim : Ahmad Imron, S.H.I.,M.H
4. Panitera : Abdul Karim, S.Ag
5. Sekretaris : Rakimin Syarif, S.Ag
6. Panitera Muda Gugatan : Yuhermi Natar BA
7. Panitera Muda Hukum : Abdullah, S.H.,M.H.
8. Kepala Sub Bagian
Kepegawaian, Organisasi
dan Tata Laksana : Fahmi Said Hakim, S.H.,M.H.
9. Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Teknologi dan
Informasi : Mochamad Idris Djawas, S.Kom.,M.H.
10. Plt. Kepala Sub Bagian
Umum dan Keuangan : Bagus Adi Prabowo, S.H.
11. Bendahara : Hamzah Usman

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA MAUMERE
(PERMA No 7 Tahun 2015)



1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran/ tujuan tertentu. Dengan terbitnya Perma No 7 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dimana jabatan Panitera dan Sekretaris mengalami pemisahan, hal tersebut mengakibatkan jabatan Panitera dan Sekretaris mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Agama Maumere telah tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor: W23-A9/22/OT.01.3/I/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Agama Maumere. Adapun standar operasional prosedur Pengadilan Agama Maumere tahun 2017 kami lampirkan dalam **Lampiran I** Laporan Tahunan 2017.

2. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Berdasarkan Amanat Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib mencapai Sasaran Kerja Pegawai yang telah ditetapkan serta untuk membangun perilaku kerja yang produktif maka perlu dibuatkan Sasaran Kinerja Pegawai setiap tahunnya. SKP ini menjadi alat kendali agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sehingga dapat dilakukan penilaian prestasi kerja terhadap pegawai.

Implementasi pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai pada kantor Pengadilan Agama Maumere telah dilaksanakan sejak awal tahun 2017, bahwa setiap pegawai sudah membuat SKP sesuai dengan tugas pokok masing-masing dan telah menjadi kesepakatan antara pegawai yang dinilai dan pejabat penilai mengenai target / kinerja yang harus dilaksanakan dalam satu tahun. Untuk lebih jelasnya sasaran kinerja pegawai (SKP) seluruh pegawai Pengadilan Agama Maumere, kami lampirkan dalam **Lampiran 2** Laporan Tahunan 2017.

B. Pelayanan Publik Yang Prima

1. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Pelaksanaan sidang keliling pada tahun 2017 adalah sebanyak 29 perkara dengan rincian sebagai berikut :

- a. Perkara Cerai Talak sebanyak 0 perkara
- b. Perkara Isbat Nikah sebanyak 29 perkara

- c. Perkara putus sebanyak 29 perkara
- d. Perkara digugurkan sebanyak 0 perkara

Pada tahun 2017 ini sidang keliling dilakukan 3 kali dengan rincian lokasinya sebagai berikut :

- a. Sidang keliling bertempat di Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, sebanyak 15 perkara.
- b. Sidang keliling bertempat di Desa Pemanan, Kecamatan Alok , Kabupaten Sikka, sebanyak 15 perkara.
- c. Sidang keliling bertempat di Desa Pemanan, Kecamatan Alok , Kabupaten Sikka, sebanyak 7 perkara.

2. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Perkara Prodeo untuk pada Tahun 2017 adalah sebanyak 30 perkara dengan rincian sebagai berikut :

- a. Perkara Cerai Talak sebanyak 1 perkara
- b. Perkara Cerai Gugat sebanyak 0 perkara
- c. Perkara Isbat Nikah sebanyak 29 perkara
- d. Perkara putus sebanyak 30 perkara
- e. Perkara digugurkan sebanyak 0 perkara

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

Pengadilan Agama Maumere merupakan instansi vertikal di bawah Mahkamah Agung RI yang berkedudukan di Maumere Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mempunyai tugas pada bidang Penyelenggaraan Peradilan Pada Tingkat Pertama. Peningkatan sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Maumere dimulai dengan pembinaan kedisiplinan, etika, perilaku dan peningkatan kompetensi. Peningkatan sumber daya manusia tersebut selalu dilakukan evaluasi melalui pengawasan rutin yang dilakukan di Pengadilan Agama Maumere. Dengan demikian diharapkan kualitas sumber daya manusia mampu menjadi pelayan masyarakat berperkara, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kondisi sumber daya manusia Pengadilan Agama Maumere pada tahun 2017 dipaparkan sebagai berikut:

Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Agama Maumere pada akhir Tahun 2017 keseluruhannya berjumlah 11 Orang yang terdiri dari:

1. Ketua	: 1 Orang
2. Wakil	: 1 Orang
3. Hakim	: 1 Orang
4. Panitera	: 1 Orang
5. Sekretaris	: 1 Orang
6. Panitera Muda Hukum	: 1 Orang
7. Panitera Muda Gugatan	: 1 Orang
8. Panitera Muda Permohonan	: 0 Orang
9. Panitera Pengganti	: 0 Orang
10. Jurusita	: - Orang
11. Jurusita Pengganti	: 3 Orang (merangkap Jabatan)
12. Staf Kepaniteraan	: - Orang
13. Plt. Kasubag Umum dan Keuangan	: 1 Orang

14. Kasubag Kepegawaian dan : 1 Orang
Organisasi Tata Laksana

15. Kasubag Perencanaan Teknologi : 1 Orang
Informasi dan Pelaporan

16. Bendahara Pengeluaran : 1 Orang

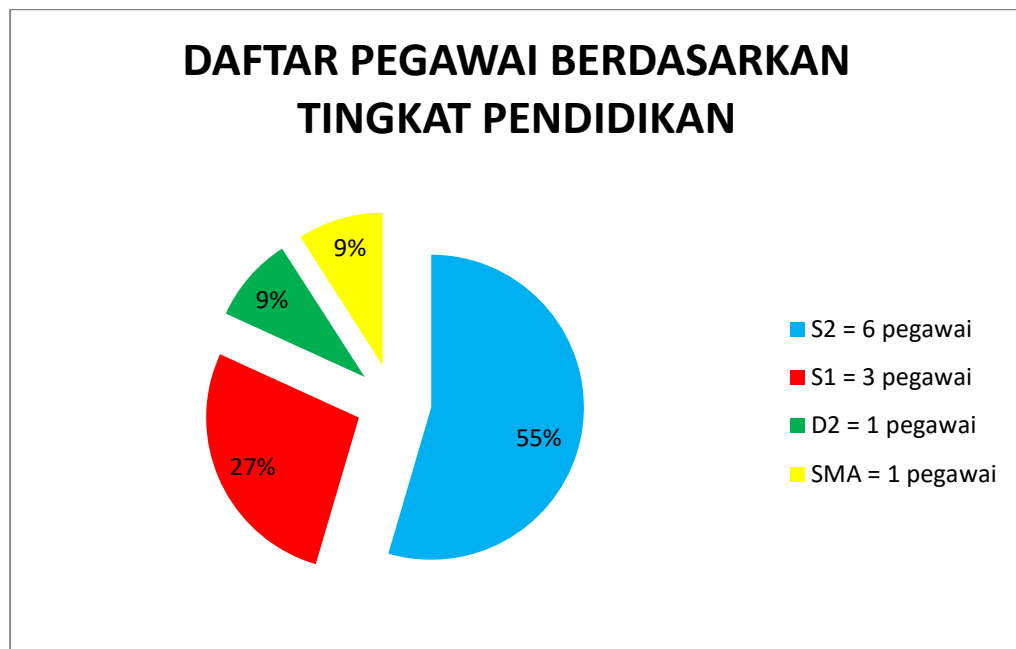
Selain Pegawai, Pengadilan Agama Maumere juga mendapatkan alokasi untuk Tenaga Honorer/PPNPN sejumlah 6 orang yang terdiri dari :

1. Pramubhakti : 3 Orang

2. Sopir : 2 Orang

3. Satpam : 1 Orang

Berikut kami tampilkan bagan Pegawai Pengadilan Agama Maumere berdasarkan tingkat Pendidikan:



Berikut daftar nama-nama Pegawai dan Tenaga Honorer / PPNPN Pengadilan Agama Maumere sampai dengan bulan Desember 2017:

Hakim :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	Awaluddin, S.H.I.,M.H. Nip. 196412311993031052	Hakim Madya Pertama (IV/a)	Ketua
2.	Sriyani HN, S.Ag, M.H. Nip. 197212312001122003	Hakim Pratama Utama (III/d)	Wakil Ketua
3.	Ahmad Imron, S.HI., MH NIP. 197804272006041004	Hakim Pratama Madya (III/c)	Hakim

Tenaga Fungsional Kepaniteraan dan Kesekretariatan :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOL.R	JABATAN / TMT
1	2	3	4
1	ABDUL KARIM, S.Ag. NIP. 197006231999031002	PenataTk.I, III/d	Panitera
2	YUHERMI NATAR, BA NIP. 196007081992032001	Penata III/c	Panitera Muda Gugatan
4	ABDULLAH, SH.,MH NIP. 197006082003121002	Penata III/c	Panitera Muda Hukum
5	RAKIMIN SYARIF, S.Ag NIP. 196705311996031001	Penata III/c	Sekretaris
6	FAHMI SAID HAKIM, SH NIP. 198303152011011007	Penata Muda Tk.I III/b	Kasubag Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana/ Panitera Pengganti Lokal
7	MOCH. IDRIS DJAWAS, S.Kom.,M.H NIP. 198112172011011003	Penata Muda Tk.I III/b	Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan / Jurusita Pengganti
8	BAGUS ADI PRABOWO, SH. Nip.198811292012121001	PenataMuda, III/b	Plt. Kasubag Umum dan Keuangan / Jurusita Pengganti
9	HAMZAH USMAN. Nip.197411022014081002	Pengatur Muda , II/a	Bendahara Pengeluaran / Jurusita Pengganti

Tenaga Honorer / PPNPN :

NO	NAMA	SEBAGAI
1	2	3
1.	Saudah Yahya, S.H.I.	Pramubhakti
2.	Ika Asti Hana, S.E.	Pramubhakti
3.	M. Fauzi Lanjar	Pramubhakti
4.	M. Ikram Muslimin, S.E.	Sopir
5.	Pedro Bayu, S.H.	Sopir
6.	Nasrudin U. Mau	Satpam

1. Mutasi

Mutasi pegawai di Pengadilan Agama Maumere sampai dengan bulan Desember 2017 adalah :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA / JABATAN BARU	ALIH TUGAS	
			DARI	KE
1	2	3	4	5
1.	Drs. H. Hasan Basri, M.H. NIP. 195711101993031002	Ketua Pengadilan Agama Maumere menjadi Hakim Pengadilan Agama Situbondo	Pengadilan Agama Maumere	Pengadilan Agama Situbondo
2.	Len Yurni, S.E NIP. 197606022009022005	Kasubag. Keuangan dan Umum Pengadilan Agama Maumere menjadi Staff Pengadilan Agama Padang Panjang	Pengadilan Agama Maumere	Pengadilan Agama Padang Panjang

2. Promosi

Promosi pada Pengadilan Agama Maumere sampai dengan bulan Desember 2017 adalah :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOL.R	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4	5
N	I	H	I	L

3. Pensiun

Pegawai Pengadilan Agama Maumere yang mengalami pensiun adalah :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOL.R	JABATAN	TMT
1	2	3	4	5
N	I	H	I	L

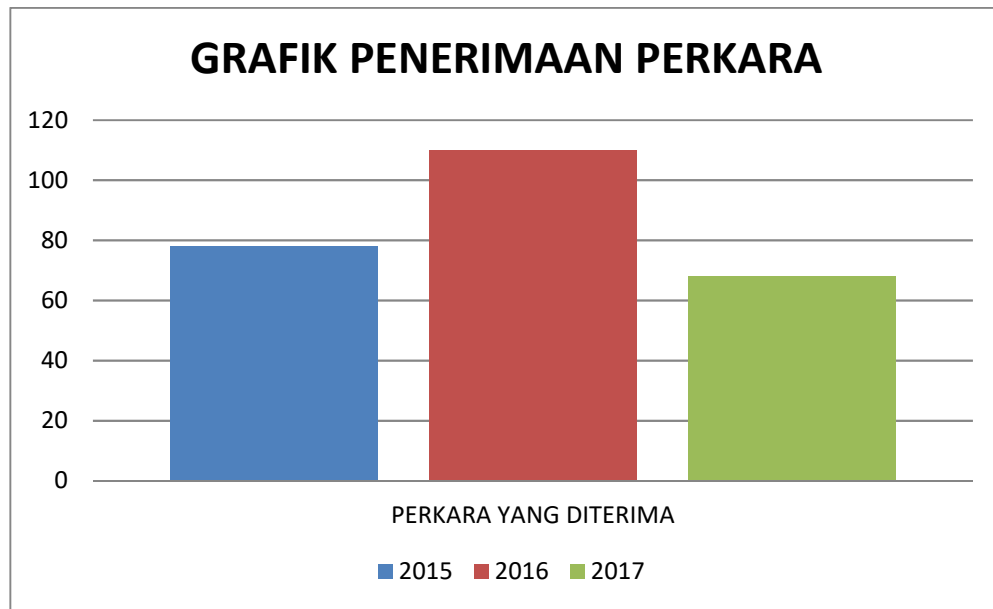
4. Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Pengadilan Agama Maumere dalam meningkatkan sumber daya manusianya senantiasa mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti Bimtek yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur, Badilag dan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta instansi lain yang memiliki hubungan kerja dengan Pengadilan Agama Maumere. Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Maumere mengirimkan 2 (Dua) orang untuk mengikuti kegiatan peningkatan sumber daya manusia dengan rincian sebagai berikut :

- a. Diklat Teknis Fungsional Jurusita/ Jurusita Pengganti tanggal 30 Oktober – 4 November 2017 di PUSDIKLAT Bogor atas nama **HAMZAH USMAN**.
- b. Pembelajaran Pelayanan Publik dan Meja Informasi Berbasis Elektronik angkatan I tanggal 12 November 2017 melalui e-learning Badilag atas nama **FAHMI SAID HAKIM, S.H.,M.H.**

B. Penyelesaian Perkara

Keadaan penerimaan perkara pada Pengadilan Agama Maumere untuk tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan perkara pada tahun 2016. Untuk tahun 2015 jumlah perkara yang diterima adalah 78, pada tahun 2016 jumlah perkara yang diterima adalah 110, dan untuk tahun 2017 jumlah perkara yang diterima adalah 68. Berikut kami tampilkan grafik perkara yang diterima Pengadilan Agama Maumere dari tahun 2015 sampai dengan 2017:



Rekapitulasi Penerimaan Perkara untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Kondisi Perkara pada Pengadilan Agama Maumere dalam tahun 2017 :

- a. Sisa perkara tahun 2016 : 7 Perkara
- b. Perkara masuk tahun 2017 : 68 Perkara
- c. Perkara yang diputus tahun 2017 : 67 Perkara

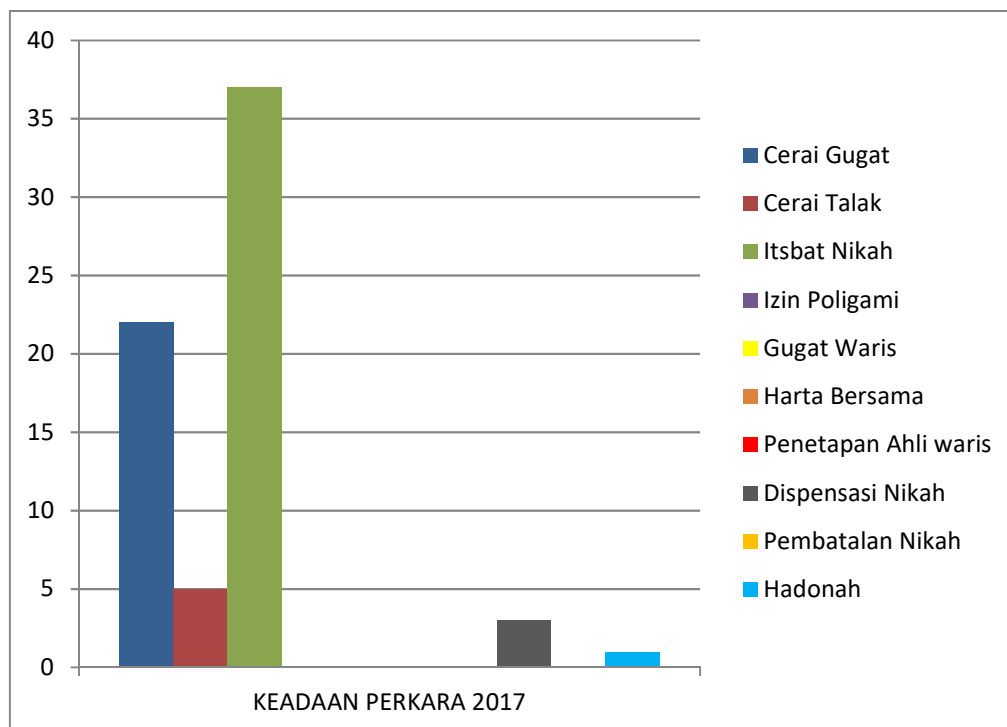
Dengan rincian sebagai berikut :

- Perkara yang dicabut : 2 Perkara
- Perkara yang dikabulkan : 65 Perkara
- Perkara yang ditolak : - Perkara
- Perkara yang tidak diterima : - Perkara
- Perkara yang di gugurkan : - Perkara
- Perkara yang dicoret : - Perkara
- Perkara Banding : - Perkara
- Perkara Kasasi : - Perkara
- Perkara PK : - Perkara
- d. Sisa Perkara tahun 2017 : 8 Perkara

Perkara yang diterima Pengadilan Agama Maumere dalam tahun 2017, berjumlah 68 perkara, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	22	Perkara
2.	Cerai Talak	5	Perkara
3.	Itsbat Nikah	37	Perkara
4.	Izin Poligami	-	Perkara
5.	Gugat Waris	-	Perkara
6.	Harta Bersama	-	Perkara
7.	Penetapan Ahli Waris	-	Perkara
8.	Dispensasi Nikah	3	Perkara
9.	Pembatalan Nikah	-	Perkara
10.	Hadhanah	1	Perkara

Berikut data grafiknya Perkara 2017:



2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Perkara yang diputus Pengadilan Agama Maumere dalam tahun 2017, berjumlah 67 perkara, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	22	Perkara
2.	Cerai Talak	5	Perkara
3.	Itsbat Nikah	37	Perkara
4.	Izin Poligami	0	Perkara
5.	Gugat Waris	0	Perkara
6.	Harta Bersama	0	Perkara
7.	Penetapan Ahli Waris	0	Perkara
8.	Dispensasi Nikah	3	Perkara
9.	Pembatalan Nikah	0	Perkara

Penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Maumere dalam tahun 2017 dalam prosentase adalah seperti tabel berikut ini :

DITERIMA			PUTUS	DICABUT	SISA	PROSENTASE PENYELESAIAN
TH. 2017	SISA 2017	JUMLAH				
68	8	68	60	2	8	86,66 %



Jumlah perkara Gugatan yang putus selama Tahun 2017 adalah 27 perkara.

Penyebab terjadinya perceraian tersebut adalah faktor-faktor sebagai berikut:

- | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|
| a. Poligami Tidak Sehat | : | - Perkara |
| b. Krisis akhlak | : | - Perkara |
| c. Cemburu | : | - Perkara |
| d. Kawin paksa | : | - Perkara |
| e. Ekonomi | : | 5 Perkara |
| f. Mabuk | : | 2 Perkara |
| g. Kekerasan Dalam Rumah Tangga | : | 1 Perkara |
| h. Perselisihan Terus Menerus | : | 8 Perkara |
| i. Meninggalkan Salah Satu Pihak | : | 8 Perkara |
| j. Kawin dibawah umur | : | - Perkara |
| k. Penganiayaan | : | - Perkara |
| l. Dihukum | : | - Perkara |
| m. Cacat badan | : | 3 Perkara |
| n. Gangguan pihak ketiga | : | - Perkara |
| o. Tidak ada keharmonisan | : | - Perkara |
| p. Jumlah | : | 27 Perkara |

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Jumlah Perkara pada Pengadilan Agama Maumere sampai dengan Desember 2017, tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK. Dengan kata lain semua perkara pada Pengadilan Agama Maumere sampai dengan Desember 2017 tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi maupun PK.

4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi

Mediasi pada Pengadilan Agama Maumere untuk tahun 2017 adalah :

No	Hasil Mediasi	Jumlah
1	Berhasil	- Perkara
2	Tidak Berhasil	28 Perkara
3	Gagal	- Perkara
4	Damai	- Perkara
Jumlah Perkara		28 Perkara

5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi

Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui diversi sampai dengan bulan Desember 2017 adalah 0 perkara.

C. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana didalam Kantor Pengadilan Agama Maumere sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik para pencari keadilan. Tahun demi tahun kantor Pengadilan Agama Maumere terus berusaha untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana walaupun masih belum maksimal. Pada Tahun 2013 Pengadilan Agama Maumere mendapat pengadaan Pembangunan Gedung Kantor baru yang diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan publik kepada para pencari keadilan dengan sertifikat cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sarana dan prasarana sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor Pengadilan Agama Maumere beralamatkan di Jalan Diponegoro, Kecamatan Alok Barat, Kelurahan Wolomarang, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, nomor telepon (0382) 21134, 23514, email pa.maumere@gmail.com. Luas secara keseluruhan Gedung Pengadilan Agama Maumere adalah 3.840 M², dengan luas kantor 500 m² x 2 lantai = 1.000 M² diresmikan pada 31 Januari 2017 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H.,M.H. Adapun penggunaan lantai I dan lantai II pada Gedung Pengadilan Agama Maumere adalah sebagai berikut:

Lantai 1

- a. Lobby / Receptionis
- b. Ruang Kepaniteraan
- c. Ruang Kesekretariatan
- d. Ruang Wakil Panitera
- e. Ruang Kasir
- f. Ruang Pendaftaran
- g. Ruang Wakil Sekretaris
- h. Ruang Bendahara
- i. Ruang Sidang Utama
- j. Ruang Sidang II
- k. Ruang Mediasi
- l. Ruang Gudang
- m. Ruang Panel
- n. Ruang Bermain Anak
- o. Ruang Laktasi dan Kesehatan
- p. 5 Kamar Mandi

Lantai 2

- a. Ruang Ketua
- b. Ruang Wakil Ketua

- c. Ruang Hakim
- d. Ruang Panitera / Sekretaris
- e. Ruang Rapat
- f. Ruang Perpustakaan
- g. Ruang Arsip
- h. Aula
- i. Pantry
- j. Ruang Gudang
- k. Mushola
- l. 5 Kamar Mandi

2. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana

a. Pengadaan Sarana Pengadilan Agama Maumere

Untuk menunjang kinerja pegawai pada tahun 2017 Pengadilan Agama Maumere mendapatkan belanja modal Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi di bidang kesekretariatan serta pendukung SIPP untuk bidang kepaniteraan, Pengadaan Teknologi informasi serta Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dengan total Rp.152.500.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1) Komputer PC	: 3	Unit
2) Printer	: 3	Unit
3) Laptop	: 1	Unit
4) Finger Print	: 1	Unit
5) TV LED	: 1	Unit
6) UPS	: 2	Unit
7) Lemari Besi	: 10	Unit
8) Antivirus	: Lisensi 3 tahun untuk 10 Users	

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung Pengadilan Agama Maumere yang disediakan dalam DIPA tahun Anggaran 2017 meliputi pemeliharaan gedung dan bangunan serta pemeliharaan mesin dengan rincian realisasi sebagai berikut:

No	Jenis Belanja Barang	Pagu Anggaran	Rincian Pemeliharaan	Realisasi Anggaran
1	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp. 99.320.000	Perawatan Gedung Kantor	Rp. 99.320.000
2	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Rp. 4.640.000	Perawatan Rumah Dinas Ketua Pengadilan Agama Maumere	Rp. 4.640.000
3	Pemeliharaan Mesin	Rp. 50.558.000 Rp. 14.320.000 Rp. 7.000.000 Rp. 5.600.000 Rp. 4.100.000 Rp. 5.500.000	- Roda 4 - Roda 2 - PC - Laptop - AC - Printer	Rp. 50.558.000 Rp. 14.320.000 Rp. 7.000.000 Rp. 5.600.000 Rp. 4.100.000 Rp. 5.500.000

c. Penghapusan dan Penetapan Status Penggunaan BMN

Pada Tahun 2017 Pengadilan Agama Maumere telah mendapat surat tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dengan Nomor : **62 /BUA/SK/2/2017** tanggal 28 Februari 2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sedangkan untuk Penghapusan Barang Milik

Negara untuk Tahun 2017 Pengadilan Agama Maumere belum melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara.

d. Administrasi Tata Persuratan

Rekapitulasi surat masuk dan keluar tahun 2017 :

Bulan	Surat Masuk	Surat Keluar
Januari	35	144
Februari	18	30
Maret	29	25
April	13	40
Mei	21	20
Juni	12	12
Juli	22	47
Agustus	31	44
September	37	41
Oktober	29	43
November	30	35
Desember	29	30
Jumlah	306	511

D. Pengelolaan Keuangan

Pada awal tahun anggaran 2017 telah menerima “ *SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017* “ dengan Nomor: SP DIPA-005.01.2.402851/2016 tertanggal 07 Desember 2016, dengan PAGU sebesar Rp. 2.216.063.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan Nomor : SP DIPA – 005.04.2.402852/2017 tertanggal 07 Desember 2016, dengan PAGU sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Namun terjadi revisi penambahan PAGU Anggaran untuk satker 402851 pada tanggal 16 November 2017 dikarenakan terdapat minus pada belanja pegawai sehingga PAGU DIPA menjadi Rp. 2.244.318.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

a. Belanja Gaji dan Tunjangan

Pagu belanja pegawai pada rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2017 pada tanggal 7 Desember 2016 yang kemudian terjadi revisi ke-01 penambahan PAGU Anggaran dikarenakan terdapat minus yang dilakukan oleh DJA pada tanggal 16 November 2017 sehingga PAGU untuk belanja pegawai bertambah menjadi Rp. 1.447.329.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Berikut Rinciannya :

- Pagu Anggaran : Rp. 1.447.329.000,-
- Realisasi Pagu : Rp. 1.435.301.706,- (99,17 %)
- Sisa Anggaran : Rp. 12.027.294,- (0,83 %)

b. Belanja Dukungan Manajemen Peradilan

Pagu belanja dukungan manajemen peradilan pada rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2017 adalah Rp. 134.080.000,- (Seratus tiga puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah). Terdapat pergeseran Pagu Anggaran akibat adanya revisi POK yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Berikut rinciannya :

- Pagu Anggaran : Rp. 134.080.000,-
- Realisasi Pagu : Rp. 134.080.000,- (100 %)
- Sisa Anggaran : Rp. 0,- (0 %)

c. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Pagu belanja operasional dan pemeliharaan kantor pada rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2017 adalah Rp. 510.409.000,- (Lima ratus sepuluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah). Terdapat pergeseran

Pagu Anggaran akibat adanya revisi POK yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Berikut rinciannya :

- Pagu Anggaran : Rp. 510.409.000,-
- Realisasi Pagu : Rp. 510.404.000,- (99,99 %)
- Sisa Anggaran : Rp. 5.000,- (0, 01 %)

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Belanja Modal

Pagu belanja modal untuk menambah sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung pada rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2017 adalah Rp. 152.500.000,- (Seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Tidak terdapat pergeseran Pagu Anggaran akibat adanya revisi POK yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Berikut rinciannya :

- Pagu Anggaran : Rp. 152.500.000,-
- Realisasi Pagu : Rp. 152.010.000,- (99,68 %)
- Sisa Anggaran : Rp. 490.000,- (0,32 %)

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Belanja Perkara

Pagu belanja perkara untuk peningkatan manajemen peradilan pada rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2017 adalah Rp. 35.500.000,- (Tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Tidak terdapat pergeseran Pagu Anggaran akibat adanya revisi POK yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Berikut rinciannya :

- Pagu Anggaran : Rp. 35.500.000,-
- Realisasi Pagu : Rp. 35.500.000,- (100 %)
- Sisa Anggaran : Rp. 0,- (0 %)

E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses informasi publik, Pengadilan Agama Maumere berusaha memberikan akses kepada publik atau masyarakat umum untuk mendapatkan informasi yang publik butuhkan, melalui website resmi www.pa-maumere.go.id. Dengan Layanan Informasi Publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Pengadilan Agama Maumere sudah mencukupi untuk mewujudkan pelayanan keterbukaan informasi kepada publik, sarana tersebut seperti computer, server, jaringan komputer yang dilengkapi dengan Wifi, PC client, telepon/faximile serta akses internet melalui LAN dan Wifi. Untuk aplikasi yang digunakan demi mewujudkan pelayanan kepada pencari keadilan Pengadilan Agama Maumere telah menggunakan Aplikasi SIPP versi 3.2.0 yang telah terhubung dalam website Pengadilan Agama Maumere, direktori Putusan serta sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia. Aplikasi SIPP terhubung juga dengan televisi pada ruang tunggu sidang yang didalamnya terdapat nama dan jadwal sidang pada Pengadilan Agama Maumere. Pengadilan Agama Maumere juga rutin mengupdate Putusan pada aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Maumere mendapat belanja modal pendukung SIPP yang diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja sehingga dapat mengoptimalkan aplikasi SIPP yang ada pada Pengadilan Agama Maumere. Adapun belanja modal pendukung SIPP pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Laptop : 1 unit
2. Komputer PC : 2 unit
3. Printer : 2 unit
4. TV LED : 1 unit
5. UPS : 1 unit

F. Regulasi Tahun 2017

Pengadilan Agama Maumere telah mempersiapkan berbagai dokumen yang diperlukan terkait dengan regulasi pada tahun 2017, yaitu :

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

Dokumen- dokumen yang disediakan .

- a. SK Ketua PA.Maumere tentang Pelayanan Publik dan Meja Informasi
- b. SK Ketua PA.Maumere tentang Penetapan Majelis Hakim
- c. SK Ketua PA.Maumere tentang Petugas Meja I, Meja II, dan Meja III
- d. SK Ketua PA.Maumere tentang Penunjukan Kasir
- e. SK Ketua PA.Maumere tentang Penunjukan Petugas Register
- f. Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
 - 2) UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - 3) Peraturan Komisi Informasi No.03 Tahun 2010 Standar Informasi Publik
 - 4) SE MARI No.3 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu
 - 5) SK Ketua MARI No.1-144/KMA/SK/I/2010 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
 - 6) Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
 - 7) Cetak Biru Pembaharuan MA Tahun 2010-2035
 - 8) Keputusan Dirjen Badilag MARI No.0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Program / Prioritas Unggulan Dirjen Badilag

2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dokumen-dokumen yang disediakan.

- a. SK Ketua PA.Maumere tentang SOP, yang terdiri dari :
 - 1) SOP Proses Penerimaan dan Penyelesaian Perkara
 - 2) SOP PP, Meja I, Meja II, dan Meja III
 - 3) SOP Kasubag Kepegawaian dan Ortala, Kasubag Umum dan Keuangan, dan Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
 - 4) SOP Hakim dan Juru sita

- b. SK Ketua PA.Maumere tentang Penunjukan Meja Pengaduan, meliputi:
 - 1) Bagan Mekanisme Pengaduan
 - 2) Laporan Petugas Meja Pengaduan Kepada Ketua
 - 3) Dokumen Pengaduan yang ditindak lanjuti
- c. Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari :
 - 1) SK Ketua MARI No.076/KMA/SK/I/2009 tentang Penanganan Pengaduan
 - 2) SK Ketua MARI No.216/KMA/SK/XII/2011 tentang Penanganan Pengaduan lewat SMS.

3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

Dokumen-dokumen yang disediakan.

- a. Struruktur Organisasi Pengadilan Agama Maumere yang dilengkapi nama Pejabat/Pegawai dan disertai dengan foto-fotonya.
- b. Informasi Pejabat-Pejabat Pengadilan Agama Maumere.
- c. SK Ketua tentang Pembagian Tugas Ketua dan Wakil ketua
- d. SK Ketua PA.Maumere tentang Job Descriptions yang disertai Uraian Tugas masing-masing Pegawai.
- e. Progran Kerja PA.Maumere Tahun 2017
- f. SK Ketua PA.Maumere tentang Penunjukan Humas
- g. Bagan tentang Prosedur Berperkara di PA.Maumere
- h. SK Ketua PA.Maumere tentang Penunjukan Petugas Perpustakaan

4. PENATAAN TATA LAKSANA

Dokumen-dokumen yang disediakan.

- a. SK Ketua PA. Maumere tentang Penunjukan Petugas IT / Pengelola Website
- b. SK Ketua PA. Maumere tentang Penunjukan Petugas SIPP
- c. SK tentang IKU (Indikator Kinerja Utama) dari Ketua PA.Maumere.
- d. SK Tim Penyusun LAKIP dari Ketua PA.Maumere
- e. LAKIP.
- f. Rencana Kerja Tahunan 2017

- g. SK Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengelola Keuangan Tahun 2017 dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)
- h. SK Bendahara Pengeluaran (DIPA) dari KPA.
- i. SK. Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang dan Jasa dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
- j. Laporan Keuangan Semester I dan Semester II tahun 2017
- k. SK Ketua PA.Maumere tentang Pengelola Biaya Proses
- l. Dokumen Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Proses.
- m. Dokumen bukti-bukti Pengeluaran Biaya Proses.
- n. Dokumen Bukti Pembayaran Tunjangan Kinerja

5. PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dokumen-dokumen yang disediakan.

- a. SK Ketua PA.Maumere tentang Tim Promosi dan Mutasi (TPM)
- b. Buku Agenda Rapat Tahun 2017
- c. SK. Ketua PA.Maumere tentang Penanggung Jawab Absensi/Daftar Hadir.
- d. Dokumen Absensi Pegawai
- e. Dokumen Surat – Surat Cuti
- f. SKP Pegawai PA.Maumere tahun 2017
- g. Profil Kepegawaian yang ditampilkan di website PA.Maumere meliputi:
 - 1) Profil Pejabat Fungsional
 - 2) Profil Pejabat Struktural
 - 3) Profil Hakim

6. PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN

Dokumen-dokumen yang disediakan.

- a. SK Ketua PA.Maumere tentang Penunjukan Penerima dan Penyetor PNB
- b. Laporan Tahunan PA.Maumere Tahun 2017
- c. Laporan Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2017
- d. Dokumen RKA-KL dan DIPA

- e. SK Ketua PA.Maumere tentang Pemegang Mobil dan Kendaraan Bermotor
- f. Peraturan Perundang-Undangan meliputi
 - 1) PP No.53 Tahun 2008 tentang PNPB
 - 2) Surat Sekretaris MARI No/674/SEK/01/XII/2010 tentang Pemberitahuan Mengenai Mekanisme Penyampaian Laporan Realisasi PNPB
 - 3) Surat Badan Urusan Administrasi MARI No.08/BUA/KEU/01/2012 tentang Pemberitahuan Petunjuk Kode Unit Organisasi Untuk Laporan dan Pencatatan PNPB ke MA
 - 4) SEMA No.14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Permohonan Kasasi dan PK

7. PROGRAM PENATAAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dokumen-dokumen yang disediakan.

- a. SK Hakim Pembina dan Pengawas Bidang dari Ketua PA.Maumere .
- b. SK. Panjar Biaya Perkara dari Ketua PA.Maumere .
- c. Dokumen Laporan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang Tahun 2017
- d. Dokumen Tindak lanjut Hasil Pengawasan
- e. Penyajian Informasi di Website PA.Maumere
- f. Transparansi Putusan di website.
- g. Tersedianya Meja Informasi
- h. Dokumen adanya Permohonan Informasi
- i. Informasi Penting yang disajikan meliputi :
 - 1) Prosedur Berperkara
 - 2) Prosedur Pengaduan
 - 3) Prosedur untuk memperoleh informasi
 - 4) Tata Cara perkara secara Prodeo
 - 5) Transparansi Biaya Panggilan
 - 6) Komponen Panjar Biaya Perkara pada PA.Maumere , Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

- 7) Tersedianya Kotak Saran
- 8) Jenis-jenis Perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
- 9) Daftar Hakim Mediator
- 10) Hak-hak Pencari Keadilan
- 11) Jadwal Sidang

8. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Dokumen-dokumen yang disediakan.

- a. Tersedianya Pelayanan Publik dan Meja Informasi yang berbasis Elektronik.
- b. SK Ketua PA.Maumere tentang Penunjukan Tempat Sidang Keliling tahun 2017.
- c. Dokumen Penyelesaian Perkara Prodeo
- d. Tersedianya Air Minum di ruang tunggu sidang
- e. Tersedianya Koran untuk bacaan di ruang tunggu sidang
- f. Peraturan Perundang-undangan berupa SEMA No.10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum yang berlaku bagi Perkara Prodeo dan Pidana pada 4 Lingkungan Peradilan dan lain-lain.

BAB IV PENGAWASAN

A. Internal

Dalam hal Pengawasan Pengadilan Agama Maumere berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, dan KMA Nomor: 145/KMA/SK//SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007. Pengadilan Agama Maumere telah melaksanakan kegiatan dimaksud, dimana dalam pelaksanaan Pengawasan tersebut yang menjadi Koordinator Pengawas adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere, dengan mengkoordinir seluruh Hakim yang menjadi Pengawas Bidang.

Ketua Pengadilan Agama Maumere telah mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang yakni sebagai berikut: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor: W23-A9/17/PS.01/SK/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 yang kemudian dikarenakan terjadi mutasi Ketua Pengadilan Agama Maumere Surat Keputusan tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang digantikan dengan Nomor : W23-A9/330/PS.01/SK/IX/2017 tanggal 14 September 2017 yang susunannya adalah sebagai berikut :

No.	N a m a	J a b a t a n	Hakim Pengawas Bidang
1.	Sriyani HN, S.Ag., MH NIP. 19721231 200112 2 003	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas dan Pengawas Bidang Kepaniteraan
2.	Ahmad Imron, S.H.I. M.H. NIP. 197804272006041004	Hakim	Pengawas Bidang Kesekretariatan

Pelaksanaan Pengawasan yang telah berjalan di Pengadilan Agama Maumere telah secara rutin/reguler.

Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dikoordinatori oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere kemudian dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere sebagai penanggung jawab tugas-tugas yang dilaksanakan. Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Maumere dapat mempelajari hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang untuk dijadikan bahan evaluasi kinerja Aparat Peradilan yang dipimpinnya.

Adapun selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 2017, pada Pengadilan Agama Maumere telah dilakukan Pengawasan dan Pembinaan oleh Tim :

1. Pengawasan internal oleh Hakim Pengawas Pengadilan Agama Maumere pada bulan Maret, Juni, September dan Desember 2017.

2. Pengawasan Reguler oleh Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur pada tanggal 30 Agustus 2017 dengan Surat Tugas Nomor : W23-A/966/HM.01.1/VIII/2017.
3. Pembinaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur tentang Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Sosialisasi SAPM dari Sekretaris dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur pada tanggal 10 Oktober 2017 .

B. Evaluasi

Evaluasi hasil pengawasan dimaksudkan untuk melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap pelaksanaan kinerja yang tidak atau belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Pengawas fungsional di luar satuan kerja Pengadilan Agama Maumere dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Direktorat Badan Peradilan Agama, dan Badan Pengawas MA-RI. Untuk Pengadilan Agama Maumere, pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Ditjen Badan Peradilan Agama , serta oleh Badan Pengawas MA-RI.

Pengawasan pada tahun 2017 dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 30 Agustus 2017 berdasarkan surat tugas nomor : W23-A/966/HM.01.1/VIII/2017, tanggal 30 Agustus 2017 Hasil pengawasan sudah ditindak lanjuti.

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur juga melakukan sosialisasi tentang Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya pada tanggal 10 Oktober 2017 berdasarkan surat tugas nomor : W23-A/1067/PS.01/X/2017, tanggal 05 Oktober 2017.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tugas pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Maumere telah berjalan dengan baik dan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kemampuan yang ada.
2. Penyelesaian perkara tahun 2017 pada tingkat pertama telah diusahakan secara maksimal. Dari sisa tahun 2016 sebanyak 7 perkara, ditambah perkara yang diterima pada tahun 2017 sebanyak 68 perkara, telah berhasil diselesaikan sebanyak 67 perkara. Terdapat penurunan penerimaan perkara pada tahun 2017 yaitu sebanyak 68 dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebanyak 110, sehingga jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahun 2017 mengalami penurunan
3. Pagu Anggaran belanja kantor Pengadilan Agama Maumere (satker 402851) tahun 2017 setelah mengalami revisi 1 sebesar Rp. 2.244.318.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) sedangkan anggaran yang terealisasi yaitu sebesar Rp. 2.231.795.706,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah) atau sebesar 99,44%. Terdapat sisa anggaran pada belanja pegawai sebesar Rp. 12.027.294,- (dua belas juta dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), belanja operasional kantor sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan belanja modal sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
4. Pagu Anggaran untuk perkara pada kantor Pengadilan Agama Maumere (satker 402852) tahun 2017 sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 100 % terserap habis.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas Peradilan juga sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang memadai dan sarana

prasarana pendukung untuk meningkatkan kinerja aparatur pegawai Pengadilan Agama Maumere

6. Minimnya Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Maumere berdampak kepada Pegawai yang merangkap pekerjaan pada bidang Kesekretariatan maupun pada bidang Kepaniteraan.
7. Perlu ditambahnya alokasi untuk penambahan Honor Tenaga Kontrak khususnya tenaga Satpam sehingga keamanan kantor dapat terjaga.
8. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif.
9. Pelaksanaan implementasi Teknologi Informasi dan transparansi peradilan sudah berjalan dengan baik dengan didukung website Pengadilan Agama Maumere yaitu pa.maumere.go.id serta aplikasi SIPP dengan menggunakan versi terbaru 3.2.0 yang telah terhubung dalam website Pengadilan Agama Maumere, direktori Putusan serta sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia. Aplikasi SIPP pada Pengadilan Agama Maumere juga terhubung dengan monitor pada ruang tunggu sidang pada Pengadilan Agama Maumere.

B. Rekomendasi

1. Untuk lebih memantapkan fungsi-fungsi pelayanan yang lebih profesional, diharapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia lebih sering lagi melaksanakan pelatihan-pelatihan di bidang Yustisial khusus di lingkungan Peradilan Agama (kepaniteraan) dan Pelatihan-pelatihan / Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi di Bagian Kesekretariatan.
2. Dalam Hal Sumber Daya Manusia hendaknya Mahkamah Agung RI dapat menambah perekrutan pegawai pada Tahun 2018 sehingga Pengadilan Agama Maumere mendapatkan tenaga Pegawai baru untuk mengisi kekosongan jabatan saat ini.